



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 99 /SEK/KU.00/03/2017
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Set
Hal : Permintaan Dokumen

10 Maret 2017

Yth. 1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
di Tempat

Sehubungan dengan Surat Ketua Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor : 06/LK-MA/03/2017 tanggal 9 Maret 2017 hal seperti pada pokok surat (terlampir), diminta kepada Saudara untuk meneruskan surat ini kepada satuan kerja di lingkungan Saudara, serta menugaskan kepada bagian terkait untuk menghimpun, melakukan verifikasi, dan melaporkan dokumen yang diminta dalam surat tersebut kepada Sekretaris Mahkamah Agung c.q. Bagian Akuntansi Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi melalui email : bagian.akuntansi.ma@gmail.com paling lambat tanggal 15 Maret 2017.

Permohonan sebagaimana pokok surat merupakan upaya Mahkamah Agung untuk mendukung pemeriksaan BPK RI secara komprehensif, guna mewujudkan Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun 2016 yang berkualitas dan handal bebas dari kekurangan penyajian yang material.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Sekretaris
Mahkamah Agung RI
A. S. Pudjoharsoyo

Tembusan:

1. Panitera Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
5. Penanggung Jawab BPK RI;
6. Pengendali Teknis BPK RI;
7. Ketua Tim Pemeriksa BPK RI.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Gatot Subroto Nomor 31, Jakarta Pusat 10210, Telepon 021-25549000 Ekstensi 3562 Faksimile 021-5700501

Jakarta, 9 Maret 2017

Nomor : 06/LK-MA/03/2017
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permintaan Dokumen

Yth.
Sekretaris Mahkamah Agung
di Jakarta

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2016 pada Mahkamah Agung sesuai Surat Tugas No. 9/ST/V/01/2017 tanggal 20 Januari 2017, kami membutuhkan dokumen terkait uang konsinyasi, uang titipan perkara pidana, dan PHI yang berada di pengadilan tingkat pertama pada **Lampiran 1** yang berada di bawah Mahkamah Agung untuk meyakini saldo Uang Titipan Pihak Ketiga/Keuangan Perkara yang akan diungkapkan dalam Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2016.

Dokumen yang kami butuhkan antara lain:

1. Rincian uang konsinyasi, uang titipan perkara pidana, dan PHI untuk masing-masing perkara/pihak sesuai saldo per 31 Desember 2016 termasuk penerimaan dan/atau pengeluaran. Rincian dituangkan pada formulir seperti pada **Lampiran 2**. Formulir dikirimkan dalam bentuk pdf yang sudah ditandatangani dan dalam bentuk excel.
2. Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen pendukung penyerahan/penerimaan uang konsinyasi, uang titipan perkara pidana, dan PHI dari para pihak kepada pengadilan. File dikirimkan dalam bentuk pdf.
3. BAST atau dokumen pendukung penyerahan/pengeluaran uang konsinyasi dari pengadilan kepada para pihak. File dikirimkan dalam bentuk pdf.

Dokumen tersebut kami harapkan dapat dikirimkan kepada **Ditjen terkait** dan kemudian diserahkan secara keseluruhan kepada tim BPK. Mengingat pentingnya dokumen tersebut dan keterbatasan waktu pemeriksaan, kami harapkan dokumen dapat kami terima paling lambat hari Senin tanggal 20 Maret 2017.

Demikianlah pemberitahuan kami. Atas bantuan dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Ketua Tim,

Rici Ricarfi Kurnia
NIP 198006132003121001

Tembusan Yth.:

- 1. Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung**
- 2. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung**
- 3. Badan Pengawasan Mahkamah Agung**
- 4. Penanggung Jawab**
- 5. Pengendali Teknis**

DAFTAR NAMA PENGADILAN

No	Nama Pengadilan	Uang Konsinyasi	Uang Titipan Perkara Pidana	PHI
A	Pengadilan Negeri (PN)			
1	PN Jakarta Selatan	√	√	√
2	PN Tangerang	√	√	-
3	PN Jakarta Timur	√	√	-
4	PN Depok	√	-	√
5	PN Jayapura	√	√	√
6	PN Jakarta Utara	√	√	-
7	PN Nganjuk	√	-	-
8	PN Gresik	√	-	√
9	PN Jakarta Pusat	√	√	√
10	PN Banjarbaru	√	-	-
11	PN Jombang	√	-	-
12	PN Sungguminasa	√	-	-
13	PN Kayuagung	√	√	-
14	PN Boyolali	√	-	-
15	PN Sidoarjo	√	-	√
16	PN Bogor	√	-	-
17	PN Surabaya	√	√	√
18	PN Ambon	√	√	-
19	PN Denpasar	√	√	√
20	PN Subang	√	-	-
21	PN Makassar	√	√	√
22	PN Cibinong	√	-	-
23	PN Batang	√	-	-
24	PN Bangil	√	-	-
25	PN Bandung	√	√	√
26	PN Limboto	√	√	-
27	PN Banda Aceh	√	√	√
28	PN Majalengka	√	-	-
29	PN Jakarta Barat	√	√	-
30	PN Sumbawa Besar	√	-	-
31	PN Medan	√	√	√
32	PN Bengkalis	√	-	-
33	PN Kab Madiun	√	-	-
34	PN Tuban	√	-	-
35	PN Kudus	√	-	-
36	PN Semarang	√	-	√
37	PN Sumedang	√	-	-
38	PN Sabang	√	-	-
39	PN Sukadana	√	-	-
40	PN Rantau Prapat	√	√	-
41	PN Kandangan	√	-	-
42	PN Tahuna	√	-	-
43	PN Bangkalan	√	-	-

No	Nama Pengadilan	Uang Konsinyasi	Uang Titipan Perkara Pidana	PHI
44	PN Pekanbaru	√	√	√
45	PN Mamuju	√	-	-
46	PN Banjarmasin	√	√	√
47	PN Mojokerto	√	√	-
48	PN Palembang	√	√	√
49	PN Yogyakarta	√	-	√
50	PN Pontianak	√	√	√
51	PN Kraksaan	√	-	-
52	PN Mataram	√	-	√
53	PN Karawang	√	-	-
54	PN Meulaboh	√	-	-
55	PN Jepara	√	-	-
56	PN Luwuk	√	-	-
57	PN Manado	√	√	√
58	PN Pekalongan	√	√	√
59	PN Sarolangun	√	-	-
60	PN Serang	√	√	√
61	PN Pagar Alam	√	-	-
62	PN Lhoksukon	√	-	-
63	PN Sengkang	√	-	-
64	PN Pariaman	√	-	-
65	PN Stabat	√	-	-
66	PN Sumber	√	-	-
67	PN Amlapura	√	-	-
68	PN Sleman	√	√	√
69	PN Tenggarong	√	-	-
70	PN Tanjung Karang	√	-	√
71	PN Cibadak	√	-	√
72	PN Jember	√	√	-
73	PN Wonogiri	√	-	-
74	PN Malang	√	-	-
75	PN Tual	√	-	-
76	PN Kalianda	√	-	-
77	PN Amuntai	√	-	-
78	PN Blambangan Umpu	√	-	-
79	PN Bekasi	√	√	√
80	PN Kupang	√	√	-
81	PN Purwokerto	√	-	√
82	PN Kota Timika	-	√	-
83	PN Ketapang	-	√	-
84	PN Sinjai	-	√	-
B	Pengadilan Agama (PA)			
85	PA Yogyakarta	√	-	-
86	PA Jakarta Pusat	√	-	-
87	PA Jakarta Barat	√	-	-
88	PA Jakarta Timur	√	-	-

No	Nama Pengadilan	Uang Konsinyasi	Uang Titipan Perkara Pidana	PHI
89	PA Jakarta Selatan	√	-	-
90	PA Surabaya	√	-	-

REKAPITULASI UANG KONSINYASI, UANG TITIPAN PERKARA PIDANA, DAN PHI

No	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran	Nama Para Pihak	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo Akhir per 31 Des 2016 (Rp)	Progress Penyelesaian Perkara*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) - (6)	(8)
A	Uang Konsinyasi						
1							
2							
3							
dst							
	Jumlah						
B	Uang Titipan Perkara Pidana						
1							
2							
3							
dst							
	Jumlah						
C	PHI						
1							
2							
3							
dst							
	Jumlah						

*) Mohon diisi penjelasan apakah perkara telah diputus atau masih proses. Jika masih proses, ada pada tahap apa. Jika telah putus, cantumkan tanggal putus.
Jika perkara telah putus namun masih ada saldo, beri penjelasan.

Jakarta, Maret 2017
Ketua PN/PA

.....
NIP.